

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Selasa, 26 Maret 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

| No | Media | Tanggal | News Title | Resume |
|----|-------------------------------|-----------------------|---|--|
| 1 | Bisnis Indonesia (halaman 7) | Selasa, 26 Maret 2019 | Bendungan Berpotensi Di-KPBUnkan | Sejumlah kalangan menilai potensi kerja sama dalam pembangunan bendungan perlu didalami. Struktur proyek yang menarik investor juga layak dieksplorasi. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan mengatakan bahwa peluang kerja sama pada proyek bendungan cukup terbuka. Terlebih, sector bendungan masuk ke dalam kriteria umum penjaminan proyek infrastruktur. |
| 2 | Bisnis Indonesia (halaman 7) | Selasa, 26 Maret 2019 | Berita Foto | Perbaikan jalan rusak di jalur pintura Brebes, Jawa Tengah. |
| 3 | Bisnis Indonesia (halaman 7) | Selasa, 26 Maret 2019 | Pengadaan Lahan Segera Tuntas | PT Citra Karya Jabar Tol, badan usaha jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, menargetkan pengadaan lahan pada dua seksi tuntas seluruhnya tahun ini. Direktur PT Jasa Sarana Diah S. Wahyusari mengatakan bahwa sebagai salah satu pemegang saham PT Citra Karya Jabar Tol, anak usahanya itu uturus mengebut pembebasan lahan terutama untuk seksi 4 (Cimalaka-Legok) dan seksi 6 (Ujung Jaya-Dawuan). |
| 4 | Bisnis Indonesia (halaman 7) | Selasa, 26 Maret 2019 | PUPR Tolak Rest Area Jalan Tol Jadi Terminal | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menilai penambahan fungsi terminal pada tempat istirahat & pelayanan di jalan tol harus dirancang dengan matang. Ide yang berasal dari Kementerian Perhubungan ini diakui belum dibahas secara intensif. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa keberadaan terminal di dalam tempat istirahat & pelayanan (TIP) atau rest area tidak boleh mengganggu fungsi jalan tol sebagai jalan bebas hambatan. |
| 5 | Bisnis Indonesia (halaman 7) | Selasa, 26 Maret 2019 | Berita Foto | Pemasangan dinding beton penahan longsor penyebab pendangkalan di area proyek normalisasi Sungai Cikeusal di Kampung Katulisan, Serang, Banten. |
| 6 | Bisnis Indonesia (halaman 8) | Selasa, 26 Maret 2019 | Manado-Bitung Beroperasi April 2020 | PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) menargetkan jalan tol Manado-Bitung dapat beroperasi pada kuartal II/2020. Proses pembebasan lahan menjadi penyebab utama belum rampungnya proyek sepanjang 39 km itu. Direktur Utama JMB George Manurung mengatakan bahwa konstruksi seksi 2A saat ini sudah mencapai 81,03%, sedangkan seksi 2B baru mencapai 13,19%. Adapun, realisasi pembebasan lahan kedua seksi tersebut masing-masing sudah mencapai 99,61% dan 83,42%. |
| 7 | Bisnis Indonesia (halaman 9) | Selasa, 26 Maret 2019 | Dampak Ekonomi Daerah Belum Terlihat | Dampak pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Jawa yang digencarkan oleh pemerintah dalam 4,5 tahun terakhir diperkirakan terhadap perekonomian daerah bakal terlihat dalam kurun waktu setelah 8-10 tahun. Pengamat Ekonomi atau Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Surabaya, Suyanto mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang sehingga dampak perubahan ekonominya pun akan terjadi secara bertahap untuk waktu yang lama. |
| 8 | Bisnis Indonesia (halaman 23) | Selasa, 26 Maret 2019 | Relaksasi Batasan Gaji Penerima FLPP Dumumkan April | Pemerintah akan mengumumkan kebijakan relaksasi Batasan penghasilan penerima bantuan KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari sebelumnya Rp4 juta menjadi Rp8 juta per bulan serta batas atas rumah bersubsidi pada April 2019. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penyediaan rumah dan tahun ini menargetkan pembangunan 1,20 juta unit atau meningkat 200.000 unit dari target sebelumnya sebanyak 1 juta unit. |
| 9 | Bisnis Indonesia (halaman 27) | Selasa, 26 Maret 2019 | Danau Rawapening Bisa Telan Rp100 Miliar | Revitalisasi Danau Rawapening di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan proyek perdana dari program perbaikan ekosistem 15 danau prioritas, diperkirakan |

| | | | | |
|----|------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Sriyono, Ketua Umum Forum koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jawa Tengah, mengatakan bahwa anggaran tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. |
| 10 | Kompas (halaman 10) | Selasa, 26 Maret 2019 | Pembangunan Rendah Karbon Diperkenalkan | Model pendekatan pembangunan rendah karbon akan digunakan sebagai dasar rancangan teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Model pembangunan selama ini dinilai menurunkan parameter lingkungan hidup mulai dari daya dukung dan daya tampung hingga kepunahan spesies. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam, Senin (25/3/2019), memperkenalkan inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang bakal diluncurkan hari Selasa (26/3) di Jakarta. "Pola pembangunan harus bergeser. Tidak bisa Bau (business as usual). Tidak bias brown economy, harus bergeser ke green economy (ekonomi hijau)," ujarnya. |

| | | | |
|--------|--|---------|-----------------------|
| Judul | Bendungan Berpotensi Di-KPBU-kan | Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 7) | | |
| Resume | Sejumlah kalangan menilai potensi kerja sama dalam pembangunan bendungan perlu didalami. Struktur proyek yang menarik investor juga layak dieksplorasi. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan mengatakan bahwa peluang kerja sama pada proyek bendungan cukup terbuka. Terlebih, sector bendungan masuk ke dalam kriteria umum penjaminan proyek infrastruktur. | | |

► SUMBER DAYA AIR

Bendungan Berpotensi

Sekali Bangun, 2-3 Fungsi Diraih

Pembangunan bendungan menjadi salah satu proyek yang dipacu pemerintah untuk mendukung irigasi dan ketahanan pangan, bahkan pasokan listrik. Pada periode 2015-2019, Kementerian PUPR diminta untuk membangun 65 bendungan yang terdiri atas 16 proyek bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru. Salah satu fungsi dari bendungan itu untuk irigasi pertanian dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air.



Sumber: Pedoman Pelaksanaan KPBU Dengan Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Bidang PUPR BISNIS/RADITYO ENO

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah kalangan menilai potensi kerja sama dalam pembangunan bendungan perlu didalami. Struktur proyek yang menarik investor juga layak dieksplorasi.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan mengatakan bahwa peluang

kerja sama pada proyek bendungan cukup terbuka. Terlebih, sektor bendungan masuk ke dalam kriteria umum penjaminan proyek infrastruktur.

Armand menjelaskan bahwa proyek infrastruktur yang tidak menghasilkan



► Pembangunan bendungan bisa dipadukan dengan proyek terkait seperti penyediaan listrik dan air minum agar lebih menarik bagi investor.

pendapatan dari tarif bisa menggunakan ketersediaan layanan atau *availability payment* sebagai skema pengembalian investasi kepada investor.

Di Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, skema ketersediaan layanan diterapkan pada proyek kerja sama preservasi jalan lintas di Sumatra.

"Harusnya [pembangunan bendungan] bisa [dikerjasamakan], seperti jalan non-tol, pembayarannya dilakukan dengan *availability payment*," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (25/3).

Layanan ketersediaan merupakan pembayaran secara berkala oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU/Perpres No. 38/2015 tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur).

Menurut Armand, pembangunan ben-

Di-KPBU-kan



Antara

dungan bisa dipadukan dengan proyek terkait seperti penyediaan listrik dan air minum agar lebih menarik bagi investor. Struktur proyek semacam ini perlu dikaji lebih lanjut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pekan lalu mengatakan bahwa kementerian tengah mengkaji peluang kerja sama dengan badan usaha dalam pembangunan bendungan. Selama ini, bendungan dibangun melalui anggaran negara.

Sejak 2015, Kementerian PUPR menancangkan pembangunan 65 bendungan baru dan lanjutan. Biaya pembangunan 65 bendungan sebesar Rp82,50 triliun seluruhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

"Saat ini KPBU sudah ada untuk air minum, di Umbulan, Lampung, dan Semarang Barat. Untuk bendungan, kami menajajaki 1—2 bendungan dibangun oleh pihak swasta," ujarnya.

BELUM ADA STUDI

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih menambahkan hingga saat ini belum ada studi mengenai potensi kerja sama dalam pembangunan bendungan. Namun, bukan berarti tidak

ada minat sama sekali dari calon investor.

Dia menyebutkan bahwa sejumlah calon investor sempat menyatakan minat untuk membangun bendungan dengan skema kerja sama.

"Hanya investornya banyak yang masih berhitung untung ruginya," ujar Sumiarsih kepada *Bisnis*, Senin (25/3).

Kementerian PUPR pada 2017 sempat menawarkan sejumlah proyek bendungan kepada calon investor, salah satunya Bendungan Tiga Dihaji, Sumatra Selatan. Bendungan yang menelan investasi Rp3,80 triliun itu belum diminati calon investor sehingga pemerintah membangun bendungan tersebut melalui APBN.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, beberapa negara sudah menginisiasi pembangunan bendungan lewat skema kerja sama. Filipina, misalnya, pada 2014 membangun Bendungan Kaliwa senilai US\$429 juta. Belakangan, Pemerintah Filipina membatalkan tender dan mengalihkan biaya pembangunan dari pinjaman luar negeri.

Sementara itu, Pemerintah Kenya telah menawarkan proyek Bendungan Magwagwa kepada investor dengan investasi senilai US\$835,60 juta. Selain bendungan, proyek ini juga mencakup pembangkit listrik, irigasi, dan penyediaan air minum. ■

| | | | |
|--------|---|---------|-----------------------|
| Judul | Berita Foto | Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 7) | | |
| Resume | Perbaikan jalan rusak di jalur pintura Brebes, Jawa Tengah. | | |

► PERBAIKAN JALAN



Antara/Diky Lukmansyah

Pekerja memperbaiki jalan rusak di jalur pantura Brebes, Jawa Tengah, Minggu (24/3). Perbaikan jalan tersebut guna memberi

kenyamanan para pengguna jalan serta untuk mencegah kecelakaan karena jalan berlubang.

| | | | |
|--------|--|---------|-----------------------|
| Judul | Pengadaan Lahan Segera Tuntas | Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 7) | | |
| Resume | PT Citra Karya Jabar Tol, badan usaha jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, menargetkan pengadaan lahan pada dua seksi tuntas seluruhnya tahun ini. Direktur PT Jasa Sarana Diah S. Wahyusari mengatakan bahwa sebagai salah satu pemegang saham PT Citra Karya Jabar Tol, anak usahanya itu uterus mengebut pembebasan lahan terutama untuk seksi 4 (Cimalaka-Legok) dan seksi 6 (Ujung Jaya-Dawuan). | | |

► JALAN TOL CISUMDAWU

Pengadaan Lahan Segera Tuntas

Bisnis, BANDUNG — PT Citra Karya Jabar Tol, badan usaha jalan tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan, menargetkan pengadaan lahan pada dua seksi tuntas seluruhnya tahun ini.

Direktur PT Jasa Sarana Diah S. Wahyusari mengatakan bahwa sebagai salah satu pemegang saham PT Citra Karya Jabar Tol, anak usahanya itu terus mengebut pembebasan lahan terutama untuk seksi 4 (Cimalaka—Legok) dan seksi 6 (Ujung Jaya—Dawuan).

“BUJT [badan usaha jalan tol] jalan terus, bahkan pengadaan untuk seksi 4 baru 8%, seksi 6 sudah 16%,” katanya, Senin (25/3).

Sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol mengakui bahwa pengerjaan jalan tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu) sedikit terhambat karena adanya kehati-hatian dalam pembangunan.

Kepala BPJT Danang Parike-

sit mengatakan bahwa untuk meningkatkan progres konstruksi fisik tol Cisumdawu, diperlukan adanya percepatan. (*Bisnis*, 25/3)

Menurut Diah, pengadaan lahan pada seksi 4 dan 6 dipercepat dan ditargetkan tahun ini tuntas seluruhnya.

Dia menilai proses pengadaan lahan bisa berlangsung cepat karena PT Citra Karya Jabar Tol sudah memiliki dana talangan dari perbankan.

“Pengadaan tanah bisa cepat. [Dana talangan] untuk pengadaan tanah sekitar Rp2 triliun, tahun ini saja,” paparnya.

Konsorsium melompati proses pembebasan lahan dan konstruksi di seksi 5 Legok—Ujung Jaya sepanjang 14,90 kilometer mengingat seksi 6 dibutuhkan untuk percepatan akses ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

“[Pengadaan] seksi 5 sambil

jalan. Kami [kerjakan] mungkin seksi 6 dulu karena lebih mudah dan akses ke Kertajati,” tuturnya.

Saat ini, PT Citra Karya Jabar Tol memproses pembangunan fisik di ruas seksi 3 Sumedang—Cimalaka sepanjang 4 kilometer karena lahannya sudah hampir 100%.

Diah mencatat proses konstruksi di ruas tersebut sudah mencapai 60% lebih. “Posisi fisik sekarang lagi persiapan pengerjaan tanah, persiapan pelapisan, lebih banyak pekerjaan tanahnya.”

Dengan kondisi tersebut, katanya, seksi 3 bisa saja dipergunakan sebagai jalur darurat untuk arus mudik Lebaran mendatang. Meskipun belum dibeton, secara fungsional ruas ini bisa digunakan.

“Kalau untuk mudik, berat karena seksi 1 baru 14%, seksi 2 bisa, seksi 3 bisa dikejar, tetapi belum operasional. Arti-

nya, cuma jalur darurat begitu saja,” ujarnya.

Ketika ditemui secara terpisah, Sekda Jabar Iwa Karniwa memastikan bahwa jalan tol Cisumdawu seksi 1 (Jatinangor—Rancakalong) dan seksi 2 (Rancakalong—Sumedang) sepanjang 28,80 kilometer yang merupakan porsi pemerintah dalam laporan terakhir menunjukkan perkembangan signifikan.

“Seksi 1 untuk lahan sudah mencapai 65,86%. Artinya, proses pembangunan sudah dimulai dan konstruksi sudah 14,26%,” paparnya.

Adapun, seksi 2 ruas sepanjang 17,35 kilometer posisi terakhir pembebasan lahan sudah 92% dan konstruksinya 81,71%. “Diharapkan seksi 1 sampai 3 itu berarti Jatinangor, Rancakalong, Sumedang, dan Cimalaka tahun ini selesai. Dan untuk total secara keseluruhan selesai 2020,” tuturnya. (K157)

| | | | |
|--------|--|---------|-----------------------|
| Judul | PUPR Tolak Rest Area Jalan Tol Jadi Terminal | Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 7) | | |
| Resume | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menilai penambahan fungsi terminal pada tempat istirahat & pelayanan di jalan tol harus dirancang dengan matang. Ide yang berasal dari Kementerian Perhubungan ini diakui belum dibahas secara intensif. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa keberadaan terminal di dalam tempat istirahat & pelayanan (TIP) atau rest area tidak boleh mengganggu fungsi jalan tol sebagai jalan bebas hambatan. | | |

► TEMPAT ISTIRAHAT & PELAYANAN

PUPR Tolak *Rest Area* Jalan Tol Jadi Terminal

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat menilai penambahan fungsi terminal pada tempat istirahat & pelayanan di jalan tol harus dirancang dengan matang. Ide yang berasal dari Kementerian Perhubungan ini diakui belum dibahas secara intensif.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa keberadaan terminal di dalam tempat istirahat & pelayanan (TIP) atau *rest area* tidak boleh mengganggu fungsi jalan tol sebagai jalan bebas hambatan.

Dia menambahkan, terminal bisa dibangun menjorok menjauhi jalan tol agar tidak mengganggu fungsi jalan tol.

“*Eggak bisa di rest area jadi terminal. Dia [terminal] harus didesain betul sehingga [aktivitasnya] tidak mengganggu yang tidak ke terminal,*” ujarnya selepas rapat kerja dengan Komisi V DPR, Senin (25/3).

Basuki mengaku bahwa PUPR belum melakukan pembahasan dengan Kemenhub, kementerian yang melontarkan gagasan penambahan fungsi terminal di dalam TIP.

Sebelumnya, gagasan pembangunan terminal di dalam TIP ini ditujukan guna mendukung trayek bus Trans-Jawa.

Basuki menyangsikan ide pembangunan terminal di dalam TIP bisa dilaksanakan dengan cepat agar dapat mengejar musim mudik Lebaran 2019.

Fungsi terminal di dalam TIP, menurutnya, hanya dimungkinkan untuk waktu sementara. “Kalau sementara mungkin, kalau permanen harus didesain dengan baik. Keamanan lalu lintas harus dikedepankan!”

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan bahwa BPJT sudah meminta pandangan badan usaha jalan tol (BUJT) terkait dengan penambahan fungsi tersebut.

Menurutnya, BUJT memberi pendapat yang beragam, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak.

“Sekarang kita telaah dulu aspek *exit* [pintu keluar] dari TIP. Yang jelas, kami tidak mengizinkan ada akses di luar jalan tol ke TIP. Jadi, perlu ada *feeder* ke luar jalan tol nantinya,” jelas Danang.

CEO Toll Road Group Business Astra Infra Wiwiek D. Santoso pernah mengatakan bahwa perusahaan sangat ketat dalam kepatuhan terhadap regulasi.

Penyediaan terminal di dalam TIP, ujarnya, perlu didasarkan pada hasil kajian yang matang. *(Rivki Maulana)*

| | | | |
|--------|---|---------|-----------------------|
| Judul | Berita Foto | Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 7) | | |
| Resume | Pemasangan dinding beton penahan longsor penyebab pendangkalan di area proyek normalisasi Sungai Cikeusal di Kampung Katulisan, Serang, Banten. | | |

► NORMALISASI SUNGAI CIKEUSAL



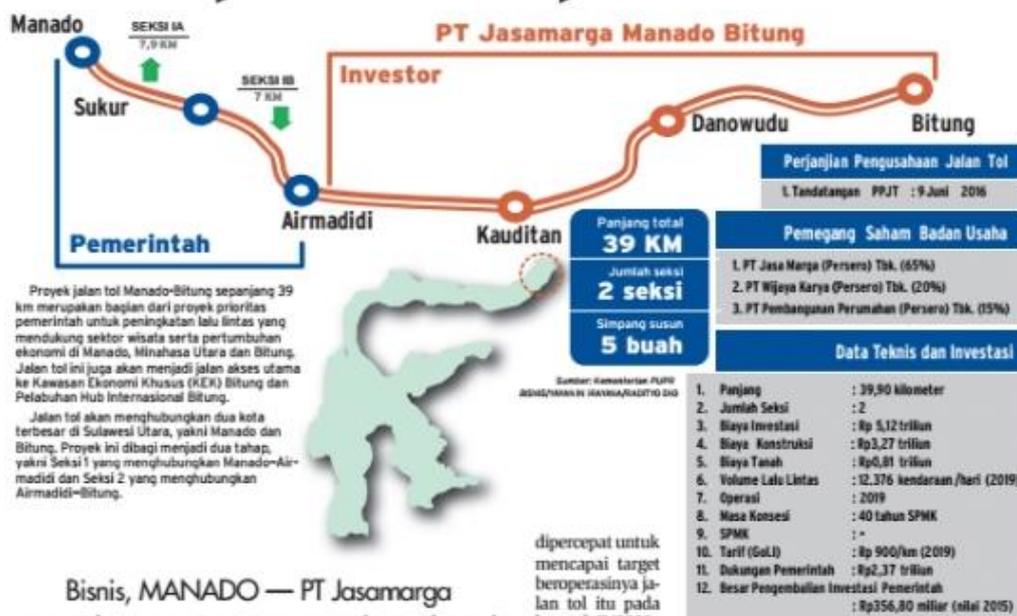
Antara/Weli Ayu Rejeki

Pekerja memasang dinding beton penahan longsor penyebab pendangkalan di area proyek normalisasi Sungai Cikeusal di Kampung Katulisan, Serang, Banten, Senin (25/3). Normalisasi Sungai Cikeusal dilakukan untuk mencegah pendangkalan sungai dan mengantisipasi terjadinya banjir bandang akibat hujan deras yang diprediksi masih berlangsung hingga April 2019.

| | | | |
|--------|--|---------|-----------------------|
| Judul | Manado-Bitung Beroperasi April 2020 | Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 8) | | |
| Resume | PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) menargetkan jalan tol Manado-Bitung dapat beroperasi pada kuartal II/2020. Proses pembebasan lahan menjadi penyebab utama belum rampungnya proyek sepanjang 39 km itu. Direktur Utama JMB George Manurung mengatakan bahwa konstruksi seksi 2A saat ini sudah mencapai 81,03%, sedangkan seksi 2B baru mencapai 13,19%. Adapun, realisasi pembebasan lahan kedua seksi tersebut masing-masing sudah mencapai 99,61% dan 83,42%. | | |

► JALAN TOL

Manado-Bitung Beroperasi April 2020



Proyek jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39 km merupakan bagian dari proyek prioritas pemerintah untuk peningkatan lalu lintas yang mendukung sektor wisata serta pertumbuhan ekonomi di Manado, Minahasa Utara dan Bitung. Jalan tol ini juga akan menjadi jalan akses utama ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung.

Jalan tol akan menghubungkan dua kota terbesar di Sulawesi Utara, yakni Manado dan Bitung. Proyek ini dibagi menjadi dua tahap, yakni Seksi 1 yang menghubungkan Manado-Airmadidi dan Seksi 2 yang menghubungkan Airmadidi-Bitung.

Bisnis, MANADO — PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) menargetkan jalan tol Manado—Bitung dapat beroperasi pada kuartal II/2020. Proses pembebasan lahan menjadi penyebab utama belum rampungnya proyek sepanjang 39 km itu.

Ilman Sudarwan
ilman.alantoni@bisnis.com

Direktur Utama JMB George Manurung mengatakan bahwa konstruksi seksi 2A saat ini sudah mencapai 81,03%, sedangkan seksi 2B baru mencapai 13,19%. Adapun, realisasi pembebasan lahan kedua seksi tersebut masing-masing sudah mencapai 99,61% dan 83,42%.

"Untuk seksi 2B walaupun memang lahan sudah bebas di atas 80% tapi cuma masih spot-spot, jadi tidak menerus, sehingga proyeknya agak kurang maksimal dalam konstruksinya," katanya di Manado, Senin (25/3).

Menurutnya, kendala utama dalam proses pembebasan lahan selama ini adalah persoalan harga tanah yang harus dibeli. Selain itu, masalah lainnya adalah persoalan administrasi,

► **Terkendala utama dalam proses pembebasan lahan selama ini adalah persoalan harga tanah yang harus dibeli.**

seperti kelengkapan dokumen ataupun sertifikat tanah.

"Tetapi harganya kemarin sudah lebih bagus, sekarang tinggal masalah administrasi. Misalnya, waktu orang membebaskan tanahnya dokumennya tidak lengkap, atau mereka tidak punya sertifikat aslinya, atau harus melalui ahli waris, itu akhirnya harus dititipkan ke pengadilan, konsinyasi," jelasnya.

Dia menargetkan seluruh proses pembebasan lahan dapat dirampungkan sebelum semester I/2019 berakhir. Dengan target itu, proses konstruksi juga akan

dipercepat untuk mencapai target beroperasinya jalan tol itu pada kuartal II/2020.

Adapun, pada akhir tahun ini perseroan menargetkan jalan tol tersebut sudah mulai beroperasi untuk memfasilitasi perayaan Natal dan tahun baru. Namun, panjang jalan yang akan dioperasikan pada akhir tahun baru mencapai sekitar 26 km.

"Akhir tahun mungkin masih 26 km, dari awal seksi 1 sampai simpang susun Danowudu, karena Bitung masih proses pembebasan lahan, tetapi kalau total operasinya, kami harapkan kuartal II/2020" ujarnya.

Dia menilai, sisi kelayakan komersial jalan tol Manado—Bitung masih cukup rendah. Target lalu lintas harian rata-rata (LHR) dipatok sekitar 14.000 kendaraan per hari, tetapi kondisi eksisting saat ini belum mencapai angka tersebut.

Hal itu pula yang membuat konstruksi jalan tol ini tidak sepenuhnya dibangun oleh JMB. Seksi 1A dan 1B sepanjang 2014 dibangun oleh pemerintah dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pinjaman dari China.

"Karena memang tol ini dari sisi traffic masih minim, pemerintah kan memang tidak

mau pembangunan hanya di Jawa dan Sumatra, tapi juga di Sulawesi. Dengan membantu 14 km, kerja sama dengan Jasamarga 25 km, tarif tolnya diharapkan bisa rendah dan terjangkau masyarakat."

Dia menjelaskan, apabila sudah beroperasi penuh secara komersial, tarif akan dipatok di kisaran Rp900/km. Dengan demikian, tarif yang harus dibayarkan oleh setiap kendaraan dari Manado menuju Bitung mencapai sekitar Rp36.000.

Perseroan juga merencanakan akan membangun dua rest area sepanjang jalan tol Manado—Bitung. Sejauh ini rencana tersebut masih berada dalam proses desain. Dia mengharapkan agar area tersebut dapat diisi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Sulawesi Utara.

"Sampai saat ini sedang desain, belum membahas pelaku usahanya. Tetapi kami akan mengajak pelaku UMKM, seperti yang diminta oleh pemerintah, jadi jalan tol itu harus dirasakan oleh masyarakat sekitar, dengan mengajak pelaku usaha masuk di rest area," jelasnya. ■

| | | | |
|--------|---|---------|-----------------------|
| Judul | Dampak Ekonomi Daerah Belum Terlihat | Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 9) | | |
| Resume | Dampak pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Jawa yang digencarkan oleh pemerintah dalam 4,5 tahun terakhir diperkirakan terhadap perekonomian daerah bakal terlihat dalam kurun waktu setelah 8-10 tahun. Pengamat Ekonomi atau Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Surabaya, Suyanto mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang sehingga dampak perubahan ekonominya pun akan terjadi secara bertahap untuk waktu yang lama. | | |

► TRANS JAWA

Dampak Ekonomi Daerah Belum Terlihat

Bisnis, SURABAYA — Dampak pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Jawa yang digencarkan oleh pemerintah dalam 4,5 tahun terakhir diperkirakan terhadap perekonomian daerah bakal terlihat dalam kurun waktu setelah 8—10 tahun.

Pengamat Ekonomi atau Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Surabaya, Suyanto mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang sehingga dampak perubahan ekonominya pun akan terjadi secara bertahap untuk waktu yang lama.

"Seperti jalur Trans Jawa ini, kalau dilihat jangka menengah mungkin 8 tahun—10 tahun ke depan bisa kita lihat perubahan riilnya, sedangkan jangka pendek yang kelihatan hanya biaya transportasi lebih murah, dan efisiensi," katanya sesuai menjadi pembicara dalam East Java Economic Forum, Serin (25/3).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong masyarakat untuk punya akses, terutama anak muda generasi milenial cenderung ingin punya usaha sendiri seperti *startup* dan inkubator akan lebih membutuhkan akses transportasi dengan perhitungan biaya yang tidak terlalu mahal.

Dia melanjutkan, dampak yang bakal terlihat dari keberadaan infrastruktur tersebut adalah munculnya sentra-sentra industri baru, mulai dari sentra industri mikro, kecil, menengah dan besar. Bahkan di wilayah timur seperti Banyuwangi saat ini sudah terjadi perubahan ekonomi karena dukungan infrastruktur bandara dan pelabuhan.

"Saya rasa pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya membutuhkan peran pemerintah, tapi juga swasta dan akademisi bersama-sama ikut membangun perekonomian Jatim dan Indonesia secara keseluruhan," imbuhnya.

Suyanto menambahkan, keberadaan Trans Jawa sendiri ke depan akan menemukan titik keseimbangan, yang berarti jalur tengah yang dulu masih akan tetap dilewati oleh masyarakat dan kalangan industri sesuai dengan kebutuhannya.

"Infrastruktur yang dibangun pemerintah adalah jalur alternatif, tentu saja

tidak akan meniadakan yang sudah ada. Masyarakat bisa memilih mau lewat yang mana, bergantung tujuannya, jarak tempuh yang lebih dekat dan murah yang mana," ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Difi Ahmad Johansyah mengatakan bahwa keberadaan Trans Jawa terutama di wilayah Jatim hingga saat ini belum terlihat dampaknya secara signifikan karena masih terlalu baru.

"Kami belum punya data untuk melihat dampak Trans Jawa ini. Mungkin tahun depan baru bisa terlihat data pertumbuhan daerah sekitarnya," katanya.

Terpisah, Corporate Communications Departement Head PT Jasa Marga (Persero), Irra Susiyanti menyebutkan sebelum jalur Trans Jawa tersambung pada November 2018, jumlah volume lalu lintas jalan tol yang dikelolanya mencapai sekitar 621.557 per hari.

"Setelah Trans Jawa tersambung pada 6-12 Januari 2019, total volume lalu lintasnya naik menjadi rata-rata 660.567 per hari," katanya.

Namun, lanjutnya, setelah dilakukan pemberlakuan tarif Trans Jawa pada 22—28 Januari 2019, total volume lalu lintas menurun menjadi rata-rata 632.134 per hari.

Pada perkembangan lain, anggota Komisi VI, Juliari Batubara mendorong agar pemerintah terus mengoptimalkan sistem *online single submission* (OSS) atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk memacu pertumbuhan investasi.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, sistem OSS menjadi terobosan yang bagus dan harus dikelola sebaik mungkin agar tidak ada keluhan dan kendala teknis yang membuat calon investor tidak nyaman.

"Melalui sistem yang *paperless* tersebut kemungkinan penyelewengan semakin tereliminasi. Kami mengapresiasi peran Presiden, BKPM, dan DPMPSTP mewujudkan sistem tersebut. Ke depan semoga bisnis di Indonesia naik peringkat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pengusaha karena lebih mudah memulai usahanya," ujar Juliari di Semarang, Senin (25/3).

(k28/peni widarti)

| | | | |
|--------|--|---------|-----------------------|
| Judul | Relaksasi Batasan Gaji Penerima FLPP Diumumkan April | Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 23) | | |
| Resume | Pemerintah akan mengumumkan kebijakan relaksasi Batasan penghasilan penerima bantuan KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari sebelumnya Rp4 juta menjadi Rp8 juta per bulan serta batas atas rumah bersubsidi pada April 2019. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penyediaan rumah dan tahun ini menargetkan pembangunan 1,20 juta unit atau meningkat 200.000 unit dari target sebelumnya sebanyak 1 juta unit. | | |



Perbesar Kesempatan Pemilikan Rumah

Angka kekurangan pasokan atau *backlog* perumahan hingga kini masih saja tinggi. Kalupun berkurang hanya beringsut, tidak berarti kencang. Salah satu cara agar *backlog* berkurang adalah memperbesar jumlah penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari mereka yang saat ini bergaji di bawah Rp4 juta menjadi Rp8 juta per bulan. Dengan begitu makin banyak warga yang berkesempatan memiliki rumah.

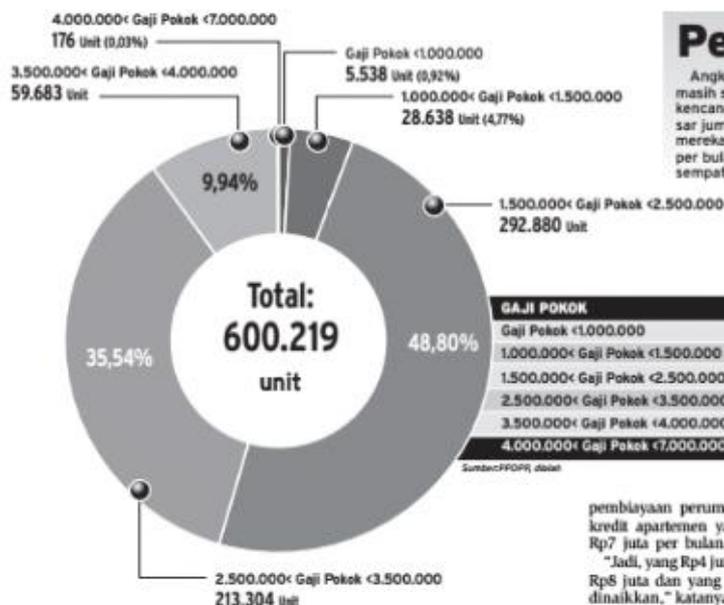


Realisasi Penyaluran Dana FLPP Tahun 2010-2019 Berdasarkan Gaji Pokok (Bulan Berjalan)

| GAJI POKOK | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Gaji Pokok <1.000.000 | 67 | 1.276 | 893 | 1.055 | 591 | 443 | 274 | 131 | 243 | 565 | 5.538 |
| 1.000.000< Gaji Pokok <1.500.000 | 851 | 9.864 | 4.697 | 5.017 | 2.767 | 2.124 | 1.446 | 511 | 1.024 | 337 | 28.638 |
| 1.500.000< Gaji Pokok <2.500.000 | 7.032 | 98.339 | 49.552 | 52.055 | 28.814 | 19.784 | 15.268 | 6.175 | 12.186 | 3.675 | 292.880 |
| 2.500.000< Gaji Pokok <3.500.000 | 7 | 31 | 9.639 | 44.552 | 41.067 | 42.121 | 30.025 | 11.297 | 25.333 | 9.232 | 213.304 |
| 3.500.000< Gaji Pokok <4.000.000 | 1 | 26 | 0 | 8 | 2.802 | 12.016 | 11.436 | 5.601 | 19.150 | 8.643 | 59.683 |
| 4.000.000< Gaji Pokok <7.000.000 | 1 | 56 | 4 | 27 | 16 | 1 | 20 | 48 | 3 | 0 | 176 |

Sumber: FLPP dan

BSIS/ASPI/DO



Bisnis, SURABAYA — Pemerintah akan mengumumkan kebijakan relaksasi batasan penghasilan penerima bantuan KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari sebelumnya Rp4 juta menjadi Rp8 juta per bulan serta batas atas rumah bersubsidi pada April 2019.

M. Rochmad Purboyo
rochmad.purboyo@bisnis.com

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalid Hamid mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penyediaan rumah dan tahun ini menargetkan pembangunan

► **Kementerian PUPR pada bulan depan juga akan mengeluarkan batas atas rumah bersubsidi untuk 2019.**

► **REI mengusulkan supaya syarat rumah bersubsidi wajib dihuni dihapuskan saja.**

1,20 juta unit atau meningkat 200.000 unit dari target sebelumnya sebanyak 1 juta unit.

Menurutnya, sejumlah langkah dilakukan untuk mencapai target tersebut, salah satunya dengan memberi kelonggaran dalam penyediaan rumah untuk aparat sipil negara (ASN), TNI dan Polri di seluruh Indonesia.

"Kami akan mengeluarkan kebijakan kenaikan batasan penghasilan penerima bantuan FLPP dari Rp4 juta menjadi Rp8 juta pada April," katanya pada acara peringatan puncak HUT Ke-47 REI, Minggu (24/3) malam.

Selain meningkatkan batasan penerima FLPP untuk rumah tapak, katanya, pemerintah juga akan meniadakan batasan penghasilan penerima fasilitas likuiditas

pembiayaan perumahan (FLPP) untuk kredit apartemen yang saat ini sebesar Rp7 juta per bulan.

"Jadi, yang Rp4 juta dinaikkan menjadi Rp8 juta dan yang Rp7 juta juga akan dinaikkan," katanya tanpa menjelaskan batasan gaji penerima FLPP apartemen. Khalid menambahkan bahwa Kementerian pada April juga akan mengeluarkan batas atas rumah bersubsidi untuk 2019. Batas atas harga ini menjadi pedoman pengembang perumahan bersubsidi dalam menjual hunian.

Sejumlah pengembang diketahui menunda peluncuran proyek rumah bersubsidi guna menunggu ketentuan baru itu. Salah satunya adalah proyek rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Citra Maja Raya, Banten.

Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengungkapkan bahwa REI secara khusus telah menyampaikan dukungan dan masukan kepada pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga merupakan Ketua Tim Pengembangan Perumahan ASN, TNI, dan Polri.

Data Bappenas menyebutkan bahwa masih ada sekitar 900.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah.

REI, kata Soelaeman, pada tahun ini menargetkan pembangunan 430.000 rumah. Kalau kebijakan khusus untuk ASN, TNI, dan Polri dapat diberikan, sedikitnya ada tambahan permintaan sebanyak

350.000 unit rumah dari berbagai tipe yang dapat dibangun pada 2019.

BI CHECKING

Menurutnya, ada beberapa usulan agar skema pembangunan rumah untuk ASN tersebut berjalan optimal di antaranya supaya ASN, TNI, dan Polri diberi pembebasan pemeriksaan rekam jejak perbankan atau BI checking untuk mendapatkan hunian murah.

Selama ini, katanya, banyak calon konsumen dari ketiga instansi tersebut yang terkendala proses BI checking. Asosiasi menilai sejauh ini risiko kredit macet yang menjerat ASN, TNI, dan Polri tergolong kecil.

"Kami minta ada kemudahan prosedur BI checking untuk calon konsumen dari ASN, TNI, dan Polri dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki penghasilan tetap yang kontinu diberikan setiap bulan oleh negara," ujar Soelaeman yang akrab dipanggil Eman.

Selain itu, REI mengusulkan supaya syarat rumah subsidi wajib dihuni dihapuskan saja.

Selama ini banyak ASN, TNI, dan Polri tidak bisa membeli rumah di kampung halaman mereka karena adanya syarat rumah yang dibeli harus dihuni seperti diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2014. Padahal, mereka selama berinas sering berpindah-pindah domisili sesuai dengan penugasan negara.

Adapun, harga rumah yang diperuntukkan bagi ASN, TNI, dan Polri agar bisa lebih mahal dibandingkan dengan

rumah bersubsidi FLPP, yaitu pada kisaran Rp300 juta hingga Rp500 juta dan disesuaikan dengan lokasi dan minat ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri yang bersangkutan.

"Karena harganya di atas batasan harga rumah FLPP, maka REI mengusulkan supaya pajak pertambahan nilai untuk rumah ASN, TNI, dan Polri tersebut hanya dikenakan terhadap selisih harga rumahnya saja."

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113/PMK.03/2014, hanya rumah bagi MBR yang dapat diberi pembebasan PPN. Saat ini, rumah bersubsidi untuk MBR berkisar antara Rp130 juta hingga Rp205 juta per unit, sedangkan konsumen yang membeli rumah dengan harga jual di atas ketentuan tersebut dikenakan PPN sebesar 10%.

"Jadi, kami berharap supaya ada paduan antara PMK dengan harga rumah untuk ASN, TNI, dan Polri," katanya.

Sekretaris Jenderal DPP REI Paulus Totok Lusida belum mau berkomentar mengenai hal ini. Dia akan menunggu dulu mekanisme pelaksanaan mengenai perubahan batas maksimum penghasilan ASN, TNI, dan Polri tersebut.

"Belum bisa berkomentar karena masih menunggu aturan dari Kementerian PUPR keluar," kata Totok.

Dia menambahkan bahwa usulan pelonggaran batasan gaji penerima bantuan FLPP memang sejak awal ditujukan bagi aparat ASN, TNI, dan Polri meskipun ke depan diharapkan dapat juga diberlakukan untuk masyarakat umum. □

| | | | |
|--------|--|---------|-----------------------|
| Judul | Danau Rawapening Bisa Telan Rp100 Miliar | Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 27) | | |
| Resume | Revitalisasi Danau Rawapening di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan proyek perdana dari program perbaikan ekosistem 15 danau prioritas, diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Sriyono, Ketua Umum Forum koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jawa Tengah, mengatakan bahwa anggaran tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. | | |

► REVITALISASI ALIRAN SUNGAI

Danau Rawapening Bisa Telan Rp100 Miliar

Bisnis, JAKARTA — Revitalisasi Danau Rawapening di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan proyek perdana dari program perbaikan ekosistem 15 danau prioritas, diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar.

Sriyono, Ketua Umum Forum koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jawa Tengah, mengatakan bahwa anggaran tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara terintegrasi dari hulu sampai hilir.

"Karena di sana [hulu Danau Rawapening] itu kebanyakan tempat rekreasi, seperti di Bandungan itu banyak pemukiman dan hotel sehingga tidak ada kesempatan air untuk meresap," tuturnya kepada *Bisnis*, Senin (25/3).

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS merupakan lembaga yang beranggotakan instansi pemerintah, akademisi, lembaga nonpemerintah, sektor swasta, dan tokoh masyarakat.

Sriyono menjelaskan bahwa Danau Rawapening merupakan danau alam. Luas genangan danau ini sekitar 1.850,1 hektare dengan rata-rata kedalaman air antara 0,35—10 meter. "Kondisi Rawapening ini sangat memprihatinkan yakni terjadi sedimentasi kurang lebih 778,93 ton per tahun," jelasnya.

Dari sisi ekonomi, Sriyono menjelaskan, Danau Rawapening dimanfaatkan sebagai hulu dari daerah irigasi di Tunjang Jelok (374 ha), Glapan Barat (10.113 ha), Glapan Timur (8.671 ha), dan Suplesi di Pelayaran Buyaran (909 ha).

Danau tersebut juga dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok dan PLTA Timo, penyedia air baku/air minum, serta berfungsi sebagai pengendali banjir di mana danau ini dimanfaatkan untuk mereduksi debit banjir Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak.

Dia menjelaskan, Pemprov Jawa Tengah telah membentuk lima kelompok kerja untuk menangani revitalisasi Rawapening. "Kalau tidak segera diselesaikan, itu menjadi bencana bagi Jawa Tengah, di mana semua potensi baik PDAM, PLTA termasuk daerah irigasi, tidak akan ada air."

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, terdapat target pemulihan 15 danau prioritas, yakni Danau Rawapening di Jawa Tengah, Rawa Danau di Banten, Batur di Bali, Toba di Sumatra Utara, Kerinci di Jambi, Maninjau, dan Singkarak di Sumatra Barat. Danau Poso di Sulawesi Tengah, Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe dan Matano di Sulawesi Selatan, Danau Limboto di Gorontalo, Sentarum di Kalimantan Barat, Jempang di Kalimantan Timur, dan Sentani di Papua.

Ida Bagus Putera Prathama, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK, menyampaikan bahwa untuk mengembalikan ekosistem 15 danau prioritas itu membutuhkan anggaran mencapai triliunan rupiah.

"Sebenarnya banyak danau kita yang rusak, tetapi yang 15 itu [statusnya] amat rusak, dana yang diperlukan banyak sekali, makanya saat ini sedang disusun rencana pengelolaan danau, di dalamnya itu ada tabel peruntukan penugasan per sektor, nanti anggarannya dari sektor tersebut," tutur Putera.

Dia menjelaskan, anggaran yang akan dikeluarkan oleh KLHK berupa dana revitalisasi bagian daerah tangkapan air yang berada di hulu, sedangkan pemukiman akan menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. "Jadi, enggak bisa disebutkan berapa besarnya karena luar biasa persoalannya," tutur Putera.

Dari 15 danau prioritas tersebut, yang akan dijadikan proyek percontohan revitalisasi adalah Danau Rawapening karena sekitar 50% arealnya udah tertutup eceng gondok. Masifnya penggunaan lahan untuk lahan pertanian di sana membuat areal danau ter sedimentasi.

"PUPR [Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] sudah bertahun-tahun *ngeruk* di sana, tetapi persoalannya tidak selesai juga karena kalau mengeruk jalan terus, tetapi sedimentasi jalan terus, ya sama saja, di sana juga 80% [lahan danau] digunakan untuk pertanian, makanya ini harus bersama dengan Kementerian Pertanian." (*Nur Falzah A.B.B.*)

| | | | |
|--------|---|---------|-----------------------|
| Judul | Pembangunan Rendah Karbon Diperkenalkan | Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019 |
| Media | Kompas (halaman 10) | | |
| Resume | Model pendekatan pembangunan rendah karbon akan digunakan sebagai dasar rancangan teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Model pembangunan selama ini dinilai menurunkan parameter lingkungan hidup mulai dari daya dukung dan daya tampung hingga kepunahan spesies. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam, Senin (25/3/2019), memperkenalkan inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang bakal diluncurkan hari Selasa (26/3) di Jakarta. "Pola pembangunan harus bergeser. Tidak bisa Bau (business as usual). Tidak bias brown economy, harus bergeser ke green economy (ekonomi hijau)," ujarnya. | | |

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan Rendah Karbon Diperkenalkan

JAKARTA, KOMPAS — Model pendekatan pembangunan rendah karbon akan digunakan sebagai dasar rancangan teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Model pembangunan selama ini dinilai menurunkan parameter lingkungan hidup mulai dari daya dukung dan daya tampung hingga kepunahan spesies.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam, Senin (25/3/2019), memperkenalkan inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang bakal diluncurkan hari Selasa (26/3) di Jakarta. "Pola pembangunan harus bergeser. Tidak bisa BAU (*business as usual*). Tidak bisa *brown economy*, harus bergeser ke *green economy* (ekonomi hijau)," ujarnya.

Model pembangunan sekarang dengan eksploitasi sumber daya alam, pembangunan tinggi emisi karbon, serta penggunaan energi dan sistem transportasi tak efisien menimbulkan polusi udara dan air, penyusutan hutan, berkurangnya sumber daya perikanan, air, dan kekayaan kehati.

Menurut Medrilzam, dari Visi 2045, laju pertumbuhan ekonomi diharapkan sebesar 5,6-5,7 persen. "Namun, jika dihitung dengan deplesi dan eksternalitas dan lain, pertumbuhan tidak akan mencapai itu, justru akan turun terus," ujarnya.

Pemerintah tak konsisten terkait batubara karena kuota batubara dinaikkan saat harga batubara naik.

Even Sembiring

akhir April 2019.

Medrilzam mengakui, penerapan model PRK tak bisa 100 persen karena akan bergantung pada visi dan misi presiden terpilih. Namun, "Tidak lagi berdasarkan persepsi, tetapi berdasarkan kajian saintifik sesuai PRK ini," ujarnya.

Manajer Kajian Kebijakan Walhi Even Sembiring mengatakan, "Kita tak bisa melihat perencanaan dari yang mereka paparkan, tetapi harus melihat apa yang dilakukan pemerintah selama ini." Di bidang energi, misalnya, sekitar 70 persen berbasis batubara.

Untuk itu perlu kebijakan lebih kuat karena kini di bidang energi, efisiensi energi baru 1 persen dan bauran energi baru terbarukan (EBT) 8 persen padahal tahun 2025 ditargetkan 23 persen. Terkait pemakaian batubara pada pembangkit listrik baru ditargetkan 35 gigawatt, penurunan akan bertahap, dan sisi permintaan akan ditekan, karena dari sisi produksi akan sulit, sebab investor terikat kontrak jangka panjang.

Indonesia dalam kontribusi nasional dimiatkan (NDC) berkomitmen menekan emisi gas rumah kaca (GRK) 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan asing. Penurunan dibandingkan emisi GRK pada pola pembangunan BAU.

Even menilai, pemerintah tak konsisten terkait batubara karena kuota batubara dinaikkan saat harga batubara naik. Perencanaan rendah karbon harus disertai evaluasi pembangunan. Hal lain harus dievaluasi yakni kebijakan restorasi gambut amat terlambat, perizinan peralihan fungsi lahan di pulau kecil padahal berpotensi untuk karbon biru. (ISW)

Dasar RPJMN

Hasil kajian tersebut akan menjadi rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 sebagai dasar pembahasan RPJMN oleh Bappenas bersama tim sukses presiden terpilih dan kementerian/lembaga. Pemaparan pada presiden terpilih diperkirakan pada